

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan wilayah merupakan proses multi disiplin yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi (Munir, 2002:13). Dalam pembangunan diperlukan sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan dari pembangunan tersebut. Perencanaan sendiri didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Conyers dan Hills, 1994). Sehingga perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada satu bidang saja tetapi banyak bidang yang dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Salah satu yang menjadi faktor tercapainya pembangunan daerah adalah tersedianya kelengkapan sarana-sarana perkotaan yang tersebar secara merata dalam mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat di suatu daerah. Sehingga tercapai sebuah kesejahteraan pada masyarakat yang berdampak pada pesatnya perkembangan di daerah tersebut.

Peningkatan jumlah penduduk mampu mempengaruhi ketersediaan kelengkapan sarana-sarana perkotaan. Sehingga penyediaan sarana-sarana perkotaan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sarana perkotaan tersebut. Apabila suatu daerah belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sarana perkotaan. Hal tersebut dapat menyebabkan penambahan beban terhadap sarana-sarana perkotaan yang sudah ada atau dapat memberikan beban terhadap wilayah sekitar yang memiliki kelengkapan sarana-sarana perkotaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Daerah yang memiliki kelengkapan sarana-sarana perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan mampu membentuk dan bertumbuh menjadi pusat pelayanan pada suatu wilayah yang ada di atasnya.

Penyediaan kelengkapan sarana-sarana perkotaan yang berbeda-beda mampu membentuk suatu hirarki-hirarki pelayanan pada suatu wilayah. Daerah dengan sarana perkotaan yang lengkap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya serta mampu melayani daerah-daerah sekitarnya akan berada pada hirarki yang paling tinggi. Sedangkan daerah yang belum memiliki kelengkapan sarana perkotaan yang sesuai

dengan kebutuhan kegiatan masyarakatnya akan berada pada hirarki yang paling rendah. Secara perkotaan, daerah yang memiliki kelengkapan sarana perkotaan serta tingkat pelayanan hingga ke daerah sekitarnya berada di wilayah perkotaan, sedangkan daerah yang belum memiliki sarana perkotaan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dengan tingkat pelayanan yang rendah berada di wilayah perdesaan.

Hirarki merupakan tingkat pelayanan yang dimulai dari pelayanan dengan tingkat terendah yang terdapat dipusat-pusat kota kecil sampai pelayanan dengan tingkat tertinggi dipusat-pusat kota besar. Dengan demikian, kota besar memiliki hampir semua jenis kegiatan pelayanan, sedangkan kota kecil kota kecil memiliki sarana dan tingkat pelayanan yang terbatas (Daldjoeni, 1992:101-104). Hirarki perkotaan menggambarkan jenjang fungsi perkotaan sebagai alat perbedaan jumlah, jenis dan kualitas dari sarana yang tersedia di kota tersebut. Atas dasar perbedaan itu, volume dan keragaman pelayanan yang dapat diberikan setiap jenis sarana juga berbeda. Perbedaan fungsi ini umumnya terkait langsung dengan perbedaan besarnya kota (jumlah penduduk). Perbedaan fungsi ini juga sekaligus menggambarkan perbedaan luas pengaruh, sehingga mengakibatkan adanya kota yang menjalankan banyak fungsi sekaligus dengan kualitas pelayanan yang tinggi dan ada kota yang hanya menjalankan beberapa fungsi saja dengan kualitas yang kurang memadai (Robinson, 2004:57). Dengan demikian, tingkat hirarki yang ada pada daerah satu dengan yang lain dapat dibedakan berdasarkan pelayan dan ketersediaan sarana yang ada.

Kecamatan Slawi merupakan ibukota dari Kabupaten Tegal dan dalam RTRW Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang memiliki fungsi sebagai pengembangan pemerintahan, perdagangan, pendidikan, industri dan militer. Kecamatan Slawi termasuk kedalam Kawasan Strategis Bregasmalang dalam sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Dengan kondisi seperti ini, mampu menjadi daya tarik bagi para pendatang sehingga jumlah penduduk di Kecamatan Slawi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari peningkatan jumlah penduduk tersebut mampu mempengaruhi penentuan jumlah sarana perkotaan yang disediakan. Sehingga dari tiap-tiap kelurahan/desa dapat dihitung serta diketahui jumlah sarana dalam memenuhi fungsi dari Kecamatan Slawi itu sendiri.

Namun, karena masih terpusatnya perkembangan pada kawasan-kawasan tertentu menyebabkan sulitnya proses pemerataan pembangunan. Akibat lainnya, arah pengembangan wilayah cenderung ke arah barat dari jalan arteri sehingga perlu tindakan antisipasi agar pengembangan wilayah lebih merata ke seluruh wilayah. Sehingga diperlukan analisis hirarki pusat pelayanan untuk mengetahui pusat-pusat pelayanan yang

ada pada tiap-tiap kelurahan/desa di Kecamatan Slawi berdasarkan ketersediaan sarana yang ada. Selain itu, diperlukan juga pengkajian tentang pesebaran pelayanan sarana guna mengetahui tingkat pemenuhan pelayanan sarana serta memberikan arah pengembangan lebih lanjut.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Kecamatan Slawi yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) bagi Kabupaten Tegal dan termasuk kedalam Kawasan Strategis Bregasmalang dalam sudut kepentingan ekonomi menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di Kecamatan Slawi. Bertambahnya jumlah penduduk tersebut harus diiringi oleh peningkatan jumlah sarana agar mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Namun, ketersediaan sarana-sarana perkotaan yang belum merata menyebabkan perkembangan di Kecamatan Slawi masih terpusat di kawasan-kawasan tertentu. Sehingga perkembangan di Kecamatan Slawi cenderung ke arah barat dari jalan arteri. Dari kondisi tersebut timbul sebuah pertanyaan yaitu bagaimana tingkat pusat pelayanan pada setiap kelurahan/desa yang berada di Kecamatan Slawi berdasarkan sarana-sarana perkotaan yang ada?

## **1.3 Tujuan dan Sasaran**

### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan laporan proyek akhir ini adalah teridentifikasinya hirarki pusat-pusat pelayanan yang ada di Kecamatan Slawi berdasarkan kelengkapan sarana-sarana perkotaan yang tersedia di Kecamatan Slawi dan melihat kecukupan sarana-sarana perkotaan di Kecamatan Slawi melalui jumlah kebutuhannya berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

### **1.3.2 Sasaran**

Sasaran yang dituju untuk untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik wilayah Kecamatan Slawi;
2. Mengidentifikasi ketersediaan sarana-sarana perkotaan di Kecamatan Slawi;
3. Menganalisis hirarki pusat pelayanan di Kecamatan Slawi dengan metode Skalogram Guttman dan Indeks Sentralitas Marshal (ISM);
4. Menghitung kecukupan sarana-sarana perkotaan berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;
5. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi untuk arahan pengembangan di Kecamatan Slawi.

## 1.4 Ruang Lingkup

### 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kecamatan Slawi secara geografis terletak pada posisi antara 109°04'25" BT - 109°08'04" BT dan 6°53'44" LS - 6°55'11" LS, dengan luas wilayah 1.363 Ha atau 13,63 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Slawi memiliki batas administrasi sebagai berikut,

sebelah Utara : Kecamatan Adiwerna

sebelah Timur : Kecamatan Pangkah

sebelah Barat : Kecamatan Dukuhwaru

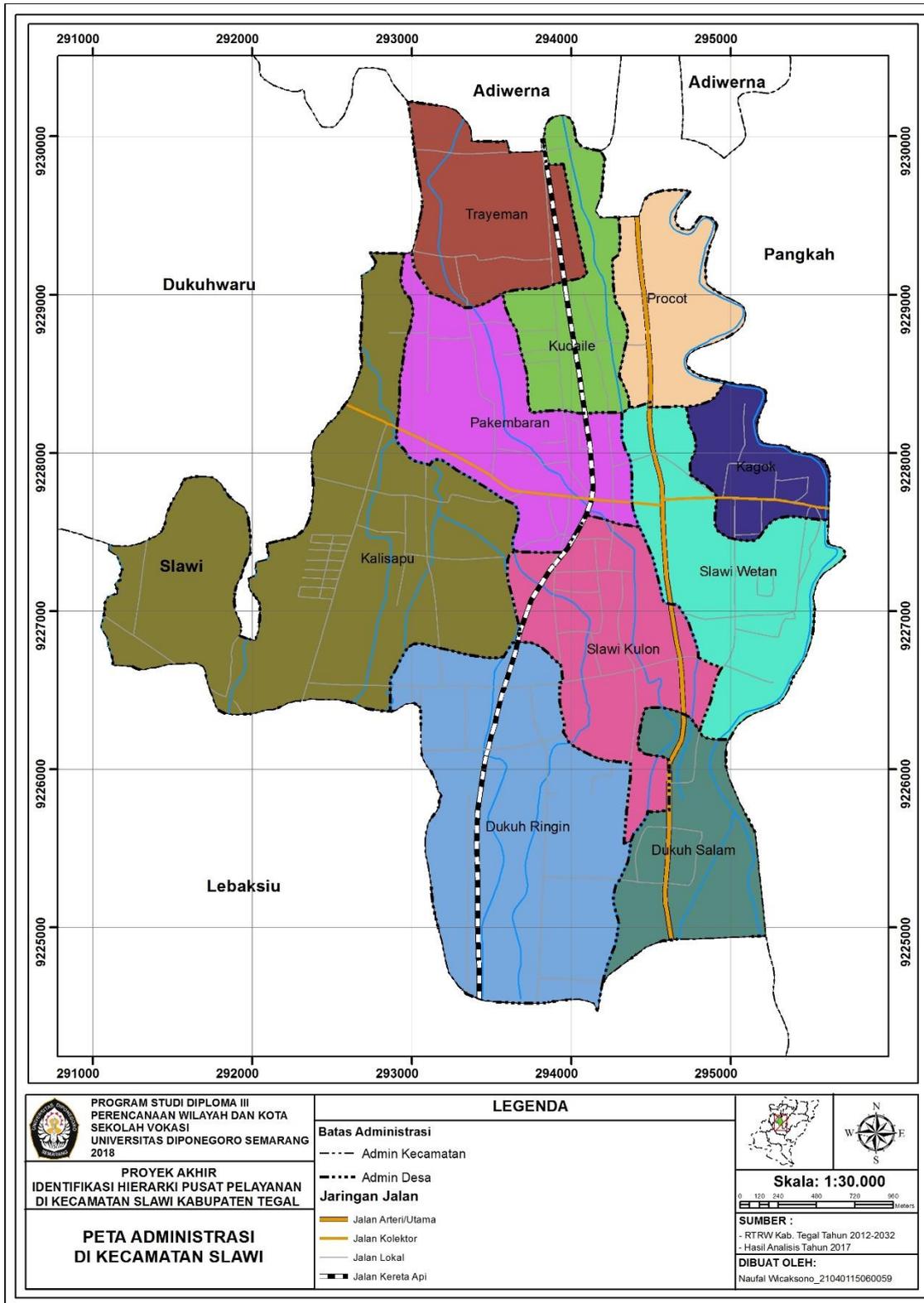
sebelah Selatan : Kecamatan Lebaksiu dan Kecamatan Dukuhwaru

Kecamatan Slawi memiliki 10 desa/kelurahan. Berikut adalah tabel luas wilayah dan pembagian administrasi Kecamatan Slawi tahun 2016.

**Tabel I. 1**  
**Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan Slawi Tahun 2016**

| No. | Desa/Kelurahan | Luas (Km <sup>2</sup> ) | Persentase |
|-----|----------------|-------------------------|------------|
| 1   | Kalisapu       | 3,22                    | 0,23       |
| 2   | Dukuh Ringin   | 2,39                    | 0,17       |
| 3   | Dukuh Salam    | 1,41                    | 0,10       |
| 4   | Slawi Kulon    | 1,18                    | 0,09       |
| 5   | Slawi Wetan    | 1,02                    | 0,07       |
| 6   | Kagok          | 0,63                    | 0,05       |
| 7   | Procot         | 0,95                    | 0,07       |
| 8   | Kudaile        | 0,80                    | 0,06       |
| 9   | Trayeman       | 0,96                    | 0,07       |
| 10  | Pakembaran     | 1,38                    | 0,09       |

Sumber : Kecamatan Slawi Dalam Angka, 2017



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal, 2012-2032

**Gambar I. 1**  
**Peta Administrasi Kecamatan Slawi Tahun 2018**

#### 1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam laporan proyek akhir ini adalah mengenai identifikasi hirarki pusat pelayanan sarana. Data-data yang digunakan adalah data persebaran sarana-sarana perkotaan tahun 2016 serta data-data pendukung lainnya. Substansi yang akan dibahas antara lain:

1. Identifikasi Karakteristik Wilayah Kecamatan Slawi merupakan pembahasan mengenai kondisi eksisting wilayah Kecamatan Slawi yang berkaitan dengan kondisi fisik alam, kondisi penduduk serta penggunaan lahan.
2. Identifikasi Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Tersedia merupakan pembahasan mengenai jumlah dan persebaran serta kondisi sarana yang ada di Kecamatan Slawi. Beberapa sarana yang dibahas antara lain:
  - a. Sarana Perkotaan
    - Sarana pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi;
    - Sarana kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan PKD;
    - Sarana peribadatan yang terdiri dari masjid, mushola, gereja, pura dan vihara;
    - Sarana perdagangan dan perniagaan yang terdiri dari departemen store, toko swalayan, pasar tradisional, bank dan koperasi;
    - Sarana olahraga yang terdiri dari lapangan sepakbola, lapangan bulu tangkis dan lapangan volley.
  - b. Prasarana Perkotaan

Aspek yang dibahas adalah jaringan transportasi yang terdiri dari jaringan jalan dan simpul transportasi yang ada di Kecamatan Slawi.
3. Analisis Hirarki Pusat Pelayanan dilakukan guna mengidentifikasi hirarki pusat-pusat pelayanan dengan menggunakan dua metode yaitu Skalogram Guttman yang mengacu pada ketersediaan dari tiap-tiap jenis sarana pelayanan yang ada dan Indeks Sentralitas Marshall yang mengacu pada keterpusatan sarana yang didasarkan pada jumlah dari tiap-tiap sarana yang ada di Kecamatan Slawi.
4. Identifikasi Ketercukupan Sarana-Sarana Perkotaan dilakukan guna mengetahui ketercukupan di tiap jenis-jenis sarana perkotaan di tiap desa/kelurahan yang didasarkan pada perhitungan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

## **1.5 Kerangka Pikir**

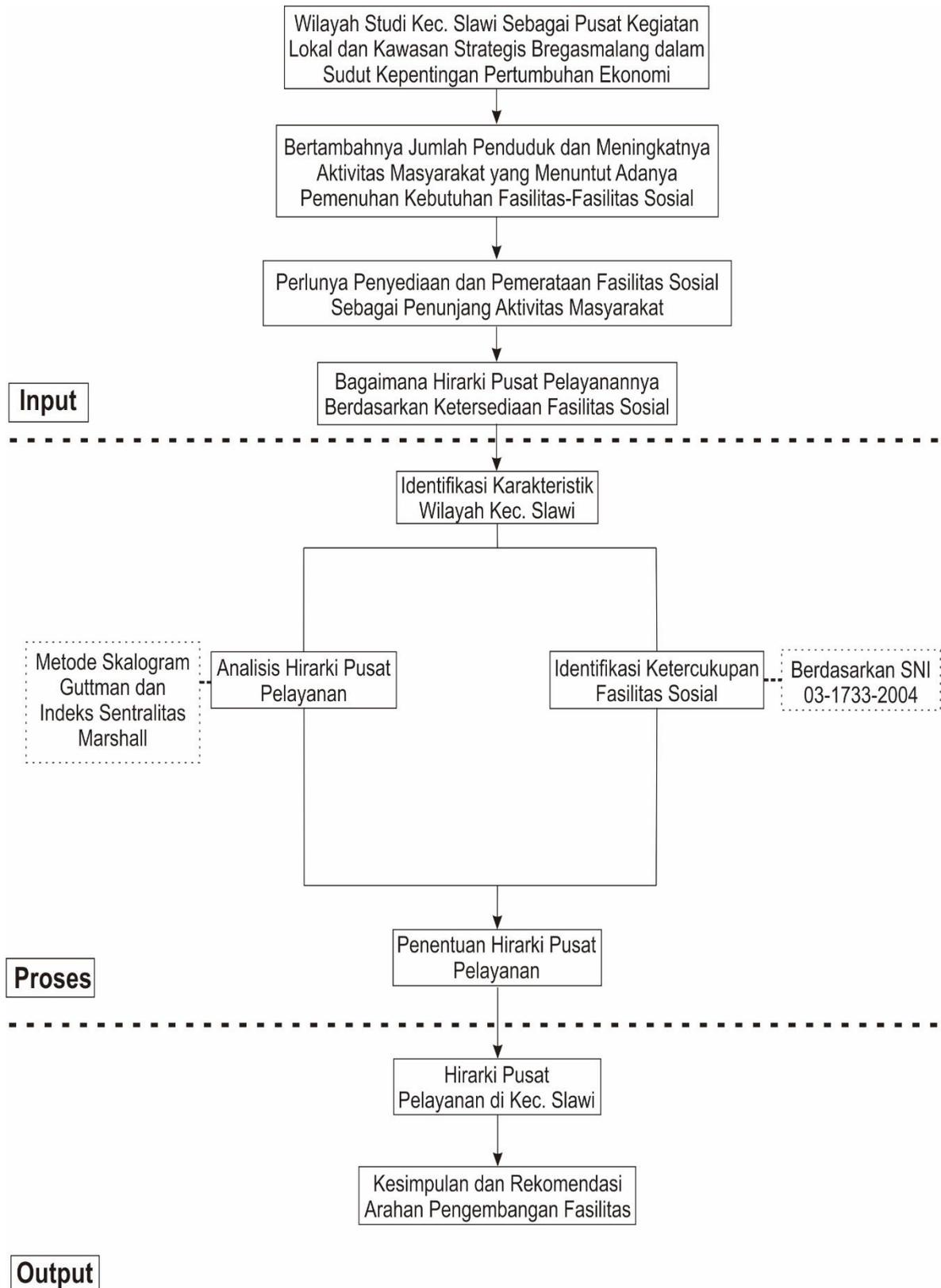
Penelitian mengenai identifikasi hierarki pusat pelayanan di Kecamatan Slawi dilatarbelakangi oleh kondisi status dari Kecamatan Slawi yang oleh RTRW Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan dan termasuk dalam Kawasan Strategis Bregasmalang dalam kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berkedudukan sebagai Ibukota Kabupaten Tegal.

Kondisi tersebut mampu memberikan dampak terhadap meningkatnya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya aktivitas penduduk di Kecamatan Slawi yang secara otomatis menuntut adanya pemenuhan kebutuhan sarana-sarana perkotaan. Sehingga diperlukan penyediaan sarana-sarana perkotaan yang ditempatkan secara merata di seluruh Kecamatan Slawi guna menunjang aktivitas penduduknya.

Beberapa analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi hierarki pusat pelayanan di Kecamatan Slawi antara lain analisis hierarki pusat pelayanan dengan menggunakan metode Skalogram Guttman dan Indeks Sentralitas Marshall. Disamping analisis tersebut, juga diperlukan perhitungan kebutuhan sarana-sarana perkotaan untuk melihat kecukupan sarana perkotaan yang telah dimiliki Kecamatan Slawi. Dari beberapa analisis tersebut, diharapkan dapat memperoleh rekomendasi yang tepat agar penyediaan sarana-sarana perkotaan dibangun secara merata sesuai dengan hierarki pusat pelayanannya dan kebutuhan penduduknya. Secara ringkasnya dapat dilihat pada gambar 1.2.

## **1.6 Batasan Studi**

Dalam studi ini, saya tidak meneliti hingga aspek kualitas dari tiap-tiap sarana perkotaan yang ada di Kecamatan Slawi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan saya, sehingga sekiranya aspek tersebut dapat diteliti oleh pihak lain guna melengkapi penelitian ini.



Sumber : Hasil Analisis, 2018

**Gambar I. 2**  
**Kerangka Pikir**

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Laporan ini tersusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan berdasarkan buku panduan penulisan proyek akhir.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang; perumusan masalah; tujuan dan sasaran; ruang lingkup yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan materi; kerangka pikir serta sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN LITERATUR DAN METODE PERENCANAAN**

Bab ini membahas mengenai kajian teori dan literatur yang digunakan untuk mendukung penyusunan laporan proyek akhir; metode perencanaan yang terdiri dari metode pengumpulan data, teknik dan alat analisis dan kebutuhan data; serta kerangka analisis.

### **BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN SLAWI**

Bab ini membahas tentang gambaran umum wilayah Kecamatan Slawi yang meliputi kondisi geografis, kondisi sosial dan kependudukan serta kondisi sarana pelayanan di wilayah Kecamatan Slawi.

### **BAB IV ANALISIS HIRARKI PUSAT PELAYANAN**

Bab ini membahas mengenai analisis hirarki pusat pelayanan dengan metode Skalogram Guttman dan Indeks Sentralitas Marshall serta melihat bagaimana kondisi ketercukupan dari tiap-tiap jenis sarana pelayanan berdasarkan SNI 03-1733-2004 di Kecamatan Slawi.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan serta rekomendasi mengenai arahan pengembangan sarana pelayanan di Kecamatan Slawi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**